

ANALISIS KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP AIR MINUM KEMASAN DI TENGAH KEBERADAAN LAYANAN PDAM (PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM): STUDI KASUS KABUPATEN TULUNGAGUNG

¹Nabila Shofiamaghfiroh, ²Imroatul Mufidah, ³A. Zahid
^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Submitted: 23-06-2026 |Revisions: 27-06-2026 |Published: 27-06 -2026

DOI : 10.32764/jesagri.v1i1.1835

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of community dependence on bottled water (AMDK) in Tulungagung Regency amid the presence of the PDAM Tirta Cahya Agung public water service. Employing a qualitative approach grounded in in-depth interviews, field observations, and a review of academic literature and public policy documents, this study argues that dependence on bottled water is not merely an individual consumption choice, but rather a rational response to manufactured risk. Risks arising from the failure to modernize aging pipe infrastructure, uneven distribution, and operational crises such as the breakdown of the Jatiwekas Water Treatment Plant in June 2025 have eroded public confidence in PDAM.. Accordingly, reforming public water governance in Tulungagung requires more than technical fixes alone it must address the dimensions of social justice and the restoration of citizens' fundamental right to safe water.

Keywords: Bottled drinking water, Risk society, Water commodification, Social inequality.

ABSTRAK

Studi ini meneliti fenomena ketergantungan masyarakat pada air minum kemasan (AMDK) di Kabupaten Tulungagung di tengah keberadaan layanan air minum publik PDAM Tirta Cahya Agung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan literatur akademis serta dokumen kebijakan publik, studi ini berpendapat bahwa ketergantungan pada air minum kemasan bukan hanya pilihan konsumsi individu, tetapi lebih merupakan respons rasional terhadap risiko yang diciptakan. Risiko yang timbul dari kegagalan modernisasi infrastruktur pipa yang sudah tua, distribusi yang tidak merata, dan krisis operasional seperti kerusakan Instalasi Pengolahan Air Jatiwekas pada Juni 2025 telah mengikis kepercayaan publik terhadap PDAM. Oleh karena itu, reformasi tata kelola air publik di Tulungagung membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan teknis, tetapi juga harusAddressing dimensi keadilan sosial dan pemulihan hak mendasar warga negara atas air bersih.

Kata kunci: Air minum dalam kemasan, Masyarakat berisiko, Komodifikasi air, Ketidaksetaraan sosial.

How to Cite:

Shofiamaghfiro, N., Mufidah, I., Zahid, A., (2026). Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Air Minum Kemasan Di Tengah Keberadaan Layanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum): Studi Kasus Kabupaten Tulungagung. *JESAgri*, 1(1),28-38. 10.32764/jesagri.v1i1.1835

***Penulis Koresponden:**

Email: naabilashofia@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan air minum yang aman merupakan pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus target krusial dalam agenda global Water, Sanitation and Hygiene (WASH) yang bertujuan menjamin akses sanitasi bagi seluruh lapisan warga (Paramita, 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi dalam menyediakan akses air bersih yang aman, terjangkau, dan andal bagi penduduknya (Paramita, 2025). Secara global, perubahan sosiokognitif yang signifikan telah memicu pergeseran perilaku konsumen, sebagaimana terlihat di Korea Selatan di mana pasar air minum dalam kemasan dan sistem pemurnian privat tumbuh pesat sebagai respons atas kecemasan terhadap lingkungan (Kim et al., 2026).

Fenomena global tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya air kini tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan telah bergeser ke arah penguatan tata kelola, inovasi kelembagaan, serta perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat (Paramita, 2025). Pergeseran ini menandai urgensi untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan publik di tingkat daerah mampu beradaptasi dengan kebutuhan riil masyarakat di tengah ancaman ekologis yang semakin nyata. Tanpa penyelarasan antara kebijakan pemerintah dan dinamika masyarakat, upaya penyediaan air bersih akan terus terjebak dalam inefisiensi yang merugikan publik secara luas.

Penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya air yang vital kerap memicu perselisihan, sehingga diperlukan strategi preventif yang matang untuk memitigasi potensi konflik domestik (Katz & Nagabhatla, 2023). Dalam konteks ruang hidrososial, ketimpangan kekuasaan antara pihak penyedia layanan dan warga terbukti menjadi faktor krusial yang menciptakan ketegangan akses, di mana suara kelompok marjinal sering kali tidak terwakili dalam pengambilan keputusan kebijakan air (Katz & Nagabhatla, 2023).

Secara sosiologis, krisis air yang diperburuk oleh dampak perubahan iklim lokal memiliki risiko besar dalam memicu instabilitas sosial-politik hingga fenomena migrasi paksa bagi kelompok rentan yang kehilangan akses atas sumber kehidupan (Katz & Nagabhatla, 2023). Meskipun berbagai daerah telah mencoba mengintegrasikan inovasi digital, seperti sistem pengukuran air pintar guna mengefisiensikan distribusi, keberhasilan teknologi tersebut tetap sangat bergantung pada keselarasan institusional dan dukungan birokrasi yang transparan (Paramita, 2025) (Herrfahrdt-Pähle, 2014).

Kepercayaan publik terhadap infrastruktur modern cenderung rapuh dan dapat runtuh seketika akibat berita pencemaran, yang pada akhirnya mengubah status air dari barang publik menjadi komoditas privat yang harus dibeli demi rasa aman (Kim et al., 2026). Di Medan, misalnya, pembelian air dalam budaya konsumen modern telah bermetamorfosis menjadi sarana pembentukan

identitas, penanda kelas, sekaligus simbol harapan akan kesehatan yang terjamin (Muhammad Safitrah, 2026).

Ketimpangan dalam pengelolaan air juga terbukti sangat terikat dengan interseksionalitas kelas, gender, dan status sosial warga di suatu wilayah (Sultana, 2022). Studi di Ghana dan India menunjukkan bahwa keterbatasan akses pada pipa publik memaksa kelompok marjinal untuk bergantung pada sumber air non-formal, sebuah praktik yang justru melanggengkan ketimpangan kekuasaan antara pemilik akses dan warga yang tersingkir (Amankwaa et al., 2025) (Rajput & Pu, 2025)

Berpijak pada literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar akar sosiologis di balik pergeseran kepercayaan warga Tulungagung dari layanan PDAM ke air kemasan privat. Dengan menggunakan teori Risk Society dari Ulrich Beck (Beck, 1992), penelitian ini berargumen bahwa ketergantungan warga pada air kemasan adalah respons rasional terhadap manufactured risk atau risiko buatan akibat kegagalan institusi modern dalam menjamin keamanan air yang seharusnya menjadi hak esensial mereka.

Secara empiris, tantangan di Kabupaten Tulungagung tergambar dari data BPS (Tulungagung, 2026) yang mencatat populasi mencapai 1.119,59 ribu jiwa, sementara jangkauan PDAM Tirta Cahya Agung baru melayani 28.047 pelanggan dari total kapasitas produksi sebesar 6.563.388 m³ (Tulungagung, 2026). Data ini menunjukkan kesenjangan distribusi yang nyata antara kapasitas produksi infrastruktur publik dan kebutuhan riil masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada paradoks pertumbuhan penduduk yang tidak dibarengi jangkauan layanan publik yang merata. Ketergantungan pada air kemasan dan depot isi ulang yang kualitasnya belum terjamin secara ketat menciptakan risiko kesehatan baru bagi warga, sehingga menuntut adanya evaluasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara agar kelompok berpendapatan rendah tidak terus menanggung beban ekonomi dan kesehatan yang tidak proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif dan makna yang dibangun masyarakat di Kabupaten Tulungagung terkait pergeseran pola konsumsi air. Secara operasional, penelitian ini berupaya membedah realitas sosial di ruang hidrososial, yaitu sebuah ruang di mana relasi kuasa, infrastruktur, dan akses air saling membentuk satu sama lain (Sultana, 2022).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan terhadap pelanggan Perumda Air Minum Tirta Cahya Agung, mahasiswa rantau, dan warga domestik di Kabupaten Tulungagung pada bulan April hingga Mei 2026. Fokus wawancara ini adalah menggali respons masyarakat terhadap risiko lingkungan dan alasan di balik hilangnya kepercayaan terhadap layanan air publik. Kedua, observasi lapangan

dilakukan untuk melihat secara langsung praktik keseharian warga dalam mengakses air minum di tengah ketidakpastian layanan PDAM. Ketiga, studi dokumen dilakukan dengan menelaah arsip pemerintah, laporan Dinas Kesehatan mengenai kualitas air depot isi ulang (DAMIU), serta pemberitaan media lokal terkait krisis pasokan air.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka Risk Society guna menjelaskan bagaimana modernitas menciptakan manufactured risk yang memaksa warga menanggung beban keselamatan sendiri (Kusvianti et al., 2023). Selain itu, analisis dilakukan dengan pendekatan konstruktivis sosiokognitif untuk memetakan bagaimana realitas pasar air minum terbentuk melalui interaksi makna antara produsen dan konsumen (Kim et al., 2026). Seluruh tahapan analisis ini bertujuan untuk membandingkan strategi adaptasi mandiri warga dengan dokumen kebijakan resmi pemerintah guna menunjukkan kesenjangan struktural yang terjadi di lapangan.relvn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Masyarakat Risiko: Komodifikasi Air, Kerapuhan Infrastruktur Publik, dan Reproduksi Ketimpangan Sosial di Tulungagung

Pergeseran struktural dari sektor agraris tradisional menuju industri manufaktur berskala besar di berbagai wilayah Indonesia tidak hanya memicu pergeseran ekonomi, melainkan juga transformasi ekologis yang konfliktual. Ketegangan antara pemenuhan kebutuhan publik dan ekspansi bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) diperumit oleh inkonsistensi regulasi tata kelola air, kaburnya sanksi hukum, serta fleksibilitas kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Mihai, 2026). Padahal, secara yuridis, negara memiliki mandat mutlak untuk menjamin hak rakyat atas air yang cukup, berkualitas, aman, berkelanjutan, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Indonesia, 2019). Ketika institusi publik gagal mewujudkan mandat yuridis ini, air bergeser dari barang bersama (*common goods*) menjadi barang privat eksklusif.



Gambar 1.1 Peta Indonesia
Sumber: Goggle Earth, 2026

Dalam konteks sosiologis, kegagalan pemenuhan ini tidak dapat dilihat sebatas persoalan teknis-operasional, melainkan harus dibaca melalui konsep manufactured risk (risiko buatan) dalam struktur masyarakat modern. Ulrich Beck

dalam karyanya yang monumental berargumen bahwa modernisasi industri telah menghasilkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan, yang secara sistematis membentuk risiko buatan yang lahir dari dalam sistem modernitas itu sendiri

(Fleurs, 2008). Orientasi masyarakat modern pun bergeser dari upaya memproduksi barang menuju upaya mengelola risiko yang terus berkembang (Mythen, 2004). Di Kabupaten Tulungagung, manifestasi masyarakat risiko ini nyata pada



tampak
tingginya

ketergantungan kelompok mahasiswa perantau dan warga domestik terhadap air minum komersial akibat ketidakpastian kualitas air tanah dan rapuhnya infrastruktur publik.

Gambar 1.2 Letak Tulungagung (PDAM Tulungagung)
Sumber: Goggle Earth, 2026

Pengalaman empiris Riska, seorang mahasiswi rantau di kawasan Plosokandang, merefleksikan bagaimana risiko sensorik (sensory risks) akibat kegagalan struktural mendorong tindakan konsumsi yang termediasi pasar: "Kualitas air kran di kosan sangat tidak nyaman saat awal pindah. Secara sensorik, ada sensasi kulit tertarik saat membilas air yang kontras dengan kualitas air di rumah asal. Kondisi visual air yang buram serta adanya aroma besi berkarat yang menyengat membuat aktivitas seperti menggosok gigi menjadi sangat tidak menyenangkan. Akibat keraguan mendasar tersebut, saya mengambil keputusan mutlak untuk mengonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek Le Minerale sejak hari pertama menempati kos" (Alifia, 2026).

Keputusan Riska untuk melakukan self-protection dengan beralih ke AMDK galon menuntutnya menyisihkan anggaran sebesar Rp60.000 hingga Rp80.000 setiap bulannya (Alifia, 2026). Beban biaya rutin ini menjadi pengeluaran ekonomi ekstra yang signifikan bagi seorang mahasiswa rantau.

Fenomena ini berkelindan dengan gagasan Beck dan Beck-Gernsheim mengenai individualization of risk (individualisasi risiko), di mana dalam fase modernitas lanjut, tanggung jawab untuk mengelola dan memitigasi risiko semakin dibebankan secara sepihak kepada individu dan rumah tangga karena negara dan lembaga publik dianggap tidak lagi mampu melindungi warganya secara penuh (Beck & Beck-gernsheim, 2002). Ketidakpercayaan terhadap air publik ini mendorong masyarakat untuk secara individual menanggung beban finansial penyediaan air minum yang aman sebuah biaya yang secara fundamental seharusnya menjadi tanggung jawab ruang publik (Jaffee, 2024).



Gambar 1.3 Komodifikasi Air Kemasan
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Gejala individualisasi risiko ini tidak hanya mengonstruksi pola konsumsi mahasiswa perantau, tetapi juga merambah ke ranah domestik warga lokal. Bagi Bu Chan, seorang warga domestik di Tulungagung, air kemasan galon kini telah bertransformasi menjadi kebutuhan pokok untuk seluruh konsumsi harian, mulai dari minum hingga aktivitas memasak seperti menanak nasi dan membuat minuman (Chan, 2026). Keputusan beralih dari air sumur ke air kemasan didasari oleh faktor kepraktisan, higienitas, serta rasa air yang jauh lebih konsisten (Chan, 2026). Dalam menyiasati tekanan finansial akibat pengalihan tanggung jawab pemenuhan air bersih ini, Bu Chan harus menyesuaikan pilihannya antara air isi ulang depot atau air kemasan segel pabrik berdasarkan kondisi anggaran bulanan dan urgensi kebutuhan rumah tangganya (Chan, 2026).

Realitas di Tulungagung ini merupakan bagian dari lanskap krisis tata kelola air berskala nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi AMDK di Indonesia terus meningkat secara konsisten, bahkan di DKI Jakarta mencatat 79,39% rumah tangga telah menggunakan air minum

kemasan(Tulungagung, 2026). Riset lain memproyeksikan bahwa separuh penduduk Indonesia akan mengandalkan AMDK sebagai sumber air minum utama mereka(Maulana & Satria, 2025). Sementara itu, data dari Asosiasi Industri Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) mencatat konsumsi AMDK nasional mencapai 29,21 miliar liter dengan pertumbuhan rata-rata 7,3% per tahun(Nabila & Zahrah, 2026). Dalam perspektif teoretis Beck, ledakan industri AMDK ini bukanlah indikator keberhasilan dinamika pasar bebas, melainkan ekspresi konkret dari masyarakat yang secara kolektif berupaya menghindari manufactured risk yang diasosiasikan dengan air keran atau air layanan publik(Beck, 1992).

Kegagalan tata kelola penyedia air publik inilah yang menjadi katalis utama bagi komodifikasi air dan pertumbuhan industri air kemasan secara global(Bakker, 2010). Ketidakpercayaan terhadap air publik merupakan perwujudan dari runtuhnya legitimasi institusi modern, yang memaksa warga beralih ke pasar swasta demi memperoleh jaminan keamanan yang termediasi oleh label, sertifikasi, dan kekuatan citra merek(Jaffee, 2024). Ketika divalidasi dengan pihak penyedia layanan publik, akar dari manufactured risk ini bersumber dari kontradiksi internal antara klaim teknis institusi dan keterbatasan infrastruktur di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sasongko, petugas pelayanan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung, terungkap dinamika operasional berikut:

"Kapasitas produksi dari sumber mata air Pagerwojo saat ini sebenarnya masih mencukupi untuk melayani seluruh pelanggan, namun tantangan utamanya terletak pada stabilitas distribusi di jam puncak dan penurunan kualitas air baku di hulu".

Untuk infrastruktur, jaringan pipa utama yang didominasi material PVC dan besi tua sedang dalam tahap peremajaan bertahap menggunakan pipa HDPE yang lebih tahan lama serta fleksibel. Sementara itu, tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) terus ditekan di bawah standar toleransi nasional melalui upaya deteksi kebocoran rutin untuk mengatasi masalah teknis dan komersial (Sasongko, 2026). Meskipun institusi mengklaim adanya upaya perbaikan teknis, dalam kacamata modernitas refleksif yang dikembangkan oleh Beck, Giddens, dan Lash, institusi publik seperti Perumda Air Minum telah mengalami pergeseran persepsi dari trustee (lembaga yang dipercaya) menjadi suspect (pihak yang dicurigai) (Beck et al., 1994). Lembaga yang semula dibentuk negara untuk mengelola risiko dan mendistribusikan air bersih secara merata, dalam praktiknya justru dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sumber ancaman itu sendiri akibat kualitas distribusi yang tidak konsisten dan infrastruktur pipa besi tua yang rentan kontaminasi(Fleurs, 2008).



Gambar 1.4 Contoh Pipa PDAM Tulungagung

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Erosi kepercayaan (*erosion of trust*) terhadap sistem ahli (*expert systems*) ini diperparah oleh minimnya keterlibatan dan kehadiran bermakna dari petugas publik di ruang domestik konsumen. Hal ini tercermin dari penuturan Mas Obin, seorang pelanggan aktif Perumda Tirta Cahya Agung:

"Rata-rata tagihan air yang dibayarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp33.500. Nilai tersebut merupakan tagihan yang keluar berdasarkan sistem tarif minimal atau beban minimum, yang berarti biaya tetap harus dibayarkan meskipun penggunaan air sangat minim atau bahkan tidak digunakan sama sekali dalam satu bulan. Terkait operasional di lapangan, aktivitas petugas PDAM yang paling sering ditemui hanyalah kunjungan rutin untuk mengecek serta mencatat angka pada meteran air sebagai dasar perhitungan tagihan bulanan"(Obin, 2026).

Sistem tarif minimum yang mengikat tanpa disertai jaminan kualitas air yang prima menciptakan paradoks struktural. Keputusan kolektif masyarakat Tulungagung untuk memboikot konsumsi air keran dan mengalokasikan dana ekstra untuk AMDK dapat dibaca sebagai tindakan "sub-politik" (*sub-politics*). Beck menjelaskan bahwa sub-politik merujuk pada tindakan-tindakan politis yang berlangsung di luar arena formal, yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga sebagai respons adaptif sekaligus bentuk penolakan terhadap kegagalan sistem institusional(Beck, 1992a). Pilihan terhadap air kemasan adalah ekspresi dari ketidakberdayaan warga terhadap kegagalan aturan dan infrastruktur publik, bukan semata-mata pilihan bebas yang digerakkan oleh preferensi pasar(Pacheco-vega, 2019).

Komodifikasi air yang terjadi di Tulungagung pada akhirnya memicu reproduksi ketimpangan sosial dan beban ekologis ganda. Di satu sisi, masyarakat kelas atas dengan mudah memitigasi risiko dengan membeli AMDK tersegel yang premium, sementara kelompok berpenghasilan rendah terperangkap dalam dilema antara mengonsumsi air keran yang diragukan kualitasnya atau bergantung pada depot air minum isi ulang yang kerap kali tidak memenuhi baku mutu mikrobiologi Permenkes (Umaidi et al., 2025). Akses terhadap air bersih pada akhirnya terikat kuat pada struktur kekuasaan, kelas sosial, dan lokasi geografis, sehingga solusi yang murni bersifat teknis tidak akan pernah mampu menyelesaikan ketidakadilan distribusi air yang bersifat struktural(Sultana, 2022b).

Di sisi lain, pelarian massal masyarakat ke sektor pasar instan ini menyisakan persoalan ekologis baru berupa timbunan limbah plastik yang menumpuk di area permukiman warga Tulungagung. Kondisi ini melahirkan ironi sempurna dari tesis masyarakat risiko: solusi komersial yang diadopsi masyarakat untuk menghindari risiko dari satu sistem (air publik) justru menghasilkan risiko lingkungan dan kesehatan baru dari sistem alternatif yang mereka pilih (limbah plastik AMDK dan kontaminasi mikroplastik) (Fleurs, 2008). Selama kegagalan tata kelola air publik tidak dibenahi secara struktural, masyarakat akan tetap terjebak dalam siklus risiko yang tak berujung di antara pilihan-pilihan pemenuhan kebutuhan hidup yang sama-sama tidak ideal.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketergantungan masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap air minum dalam kemasan (AMDK) bukanlah pilihan konsumsi individual semata, melainkan respons sosiologis rasional terhadap manufactured risk akibat kegagalan tata kelola PDAM Tirta Cahya Agung. Runtuhnya kepercayaan publik dipicu oleh ketidakandalan infrastruktur dan krisis operasional yang memaksa warga menanggung beban ekonomi ganda. Komodifikasi air ini secara sistematis mereproduksi ketimpangan sosial, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa mengakses sumber air alternatif yang kualitasnya belum terjamin, sementara negara secara tidak langsung lepas tangan dari kewajiban menjamin hak dasar warga atas air yang aman.

Sebagai langkah perbaikan, tata kelola air publik harus ditransformasi tidak hanya melalui pembenahan teknis infrastruktur dan peningkatan kualitas air, tetapi juga melalui perbaikan komunikasi layanan untuk memulihkan kepercayaan warga. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menelaah dampak kesehatan jangka panjang dari konsumsi air depot isi ulang di tingkat mikro serta mengevaluasi efektivitas kebijakan regulasi pemerintah daerah terhadap menjamurnya industri air privat. Selain itu, kajian mengenai dampak ekologis penumpukan limbah plastik sebagai konsekuensi dari pergeseran pola konsumsi air ini menjadi urgensi bagi agenda penelitian sosiologi lingkungan di masa depan.

Secara teori, apa yang terjadi di Tulungagung ini memberikan pelajaran penting bagi ilmu sosiologi lingkungan dan ekologi politik. Kasus ini menunjukkan bahwa konflik air tidak lagi sekedar masalah alam yang kekurangan air bersih, melainkan sudah berubah menjadi masalah bisnis di dalam rumah tangga karena kebutuhan dasar masyarakat sengaja dialihkan ke pasar privat (AMDK). Jika pembiaran terhadap buruknya layanan publik ini terus dianggap sebagai hal yang biasa, tanpa adanya kebijakan nyata yang membela hak masyarakat, maka jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin akan semakin dalam dan menciptakan bentuk diskriminasi baru. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa memperbaiki dan membuka ruang masukan dalam tata kelola air bukan lagi sekedar urusan administrasi atau teknis bagi pemerintah daerah, melainkan syarat utama yang wajib dipenuhi agar tidak terjadi benturan atau konflik sosial yang lebih besar di tengah masyarakat di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, akses data, serta bimbingan akademis sehingga penulisan jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung, atas keterbukaan, kerja sama, dan izin yang diberikan kepada penulis untuk mengakses data serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian.
2. Dosen Mata Kuliah Sosio-Ekologi, atas bimbingan yang tulus, saran-saran konstruktif, serta arahan teoritis yang sangat berharga sejak awal perencanaan hingga penyelesaian publikasi ini.
3. Seluruh Narasumber dan Informan di Lapangan, yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai dengan penuh

keterbukaan, sehingga penulis mendapatkan data primer yang kaya dan mendalam terkait dinamika konflik air di masyarakat.

4. Seluruh rekan sejawat dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan teknis serta diskusi kritis selama proses penyusunan jurnal ini. Apabila dianggap memiliki tingkat urgensi yang tinggi, maka ucapan terima kasih perlu dituliskan yang memuat tentang akses data, sumber pendanaan (*funding*) maupun pembimbingan serta pihak lain yang membantu keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan paper.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, R. (2026). *Wawancara pribadi tentang preferensi konsumsi air bersih di Tulungagung*. Wawancara oleh Imroatul, Nabila.
- Amankwaa, G., Kwarteng, K. A., & Ampratwum, E. (2025). "Abura-politics": The everyday politics and negotiations of households' self-supplied water infrastructure in urban Ghana. *Habitat International*, 163(June), 103480. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103480>
- Bakker, K. (2010). *Privatizing Water: Governance Failure and the World's Urban Water Crisis*. Cornell University Press.
- Beck, U. (1992). *Risk Society: Towards a New Modernity*. Sage Publications.
- Beck, U., & Beck-gernsheim, E. (2002). *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. 1–22.
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Stanford University Press.
- Chan. (2026). *Wawancara pribadi tentang preferensi konsumsi air bersih di Tulungagung*. Wawancara oleh Imroatul, Nabila.
- Fleurs, L. (2008). *WORLD AT RISK: THE NEW TASK OF CRITICAL THEORY*. 37(1), 1–22.
- Herrfahrdt-Pähle, E. (2014). Applying the concept of fit to water governance reforms in South Africa. *Ecology and Society*, 19(1). <https://doi.org/10.5751/ES-05964-190125>
- Indonesia, P. R. (2019). Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, (011594), 50. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>
- Jaffee, D. (2024). Unequal trust : Bottled water consumption , distrust in tap water , and economic and racial inequality in the United States. *WIREs Water*, 10(October 2023), 1–10. <https://doi.org/10.1002/wat2.1700>
- Katz, D., & Nagabhatla, N. (2023). Damming Disputes: Conflict Prevention in Water Management. *Water (Switzerland)*, 15(13), 1–8. <https://doi.org/10.3390/w15132476>
- Kim, D. H., Park, J. E., & Lee, S. (2026). Socio-Cognitive Dynamics in Sustainable Water Product Markets: A Constructivist Grounded Theory Study of Korea's Bottled and Purified Water Industries. *Sustainability (Switzerland)*, 18(6), 1–30. <https://doi.org/10.3390/su18063038>
- Kusvianti, P., Ashari, A. P. R., & Izzah, A. N. (2023). Pandangan Ulrich Beck Tentang Risiko dan Ketidakpastian yang Dialami Oleh Masyarakat Modern.

- Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 149–163.
<https://doi.org/10.35965/eco.v23i1.2495>
- Maulana, H. F., & Satria, E. (2025). Sentiment Analysis and Topic Modeling of Twitter Conversations in Indonesia ' s 2024 Presidential Election Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik Percakapan Twitter dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024. *Jurnal Pekommas*, 10(1), 17–28.
<https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5545>
- Mihai, M.-M. (2026). Volume :This paper offers a comprehensive examination of Max Weber ' s Received theory of rationalization , tracing its conceptual foundations and exploring its enduring relevance in contemporary society . Accepted Beginn. *Journal of Corporate Responsibility and Leadership*, 1(4), 47–57. <https://doi.org/10.12775/JCRL.2017.021>
- Muhammad Safitrah, M. J. (2026). The Commodification Of Religion In Ainiqua Mineral Water Products In Medan City. *Journal Analytica Islamica*, Vol. 15.
- Mythen, G. (2004). *Ulrich Beck: A Critical introduction to the risk society*. Pluto Books.
- Nabila, A., & Zahrah, H. (2026). Indonesia Economic Journal. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 693–703. <https://doi.org/10.63822/yea8e254>
- Obin. (2026). *Wawancara pribadi tentang preferensi konsumsi air bersih di Tulungagung*. Wawancara oleh Imroatul, Nabila.
- Pacheco-vega, R. (2019). (Re) theorizing the Politics of Bottled Water : Water Insecurity in the Context of Weak Regulatory Regimes. *Water*, 11(4), 658.
<https://doi.org/10.3390/w11040658>
- Paramita, N. (2025). *The Acceleration Secrets Water, Sanitation and Hygiene (WASH)* (R. R. A. Siregar, Ed.; Cetakan Pe). Institut Teknologi PLN.
- Rajput, R., & Pu, J. (2025). Water-caste-gender-tourism nexus in Bodh Gaya, India: assessing water inequalities using urban political ecology framework. *Sustainability Nexus Forum*, 33(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s00550-025-00567-z>
- Sasongko. (2026). *Wawancara pribadi tentang preferensi air bersih di Tulungagung*. Wawancara oleh Imroatul, Nabila.
- Sultana, F. (2022a). The unbearable heaviness of climate coloniality. *Political Geography*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102638>
- Sultana, F. (2022b). The unbearable heaviness of climate coloniality. *Political Geography*, 99, 102638. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102638>
- Tulungagung, B. K. (2026). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2026 / Tulungagung Regency in Figures 2026*. <https://doi.org/0215-5885>
- Umaid, Masyitah, Abduh, & Syamsir. (2025). Integrative Perspectives of Social and Science. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(7), 9074–9083.